

Sistematika Pembahasan

1. Latar Belakang dan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan
2. Prinsip Pengembangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau
3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau
4. Rumusan Tujuan dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau
5. Penutup



1. Latar Belakang dan Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Perencanaan Berbasis Lahan dan Sumber Daya Terbarukan



- Bentang lahan merupakan inti dari pendekatan GGP karena perannya sebagai **sumber daya dan penyedia jasa ekosistem**;
- Kebutuhan akan ruang dalam melakukan kegiatan **ekonomi terus bertumbuh, sedangkan ketersediaan lahan cenderung tetap**;
- Menyesuaikan **kebutuhan lahan untuk beragam penggunaan oleh berbagai pemangku kepentingan** merupakan hal yang krusial untuk mendapatkan pertumbuhan berkelanjutan dari sektor berbasis lahan;
- Heterogenitas spasial mengharuskan **pendekatan eksplisit secara spasial dalam perencanaan**, tetapi hal ini masih terkendala karena sistem peta tunggal (*one map*) belum tersedia dan rencana pembangunan sering kali tidak realistis, karena tidak mempertimbangkan ketersediaan lahan dan tidak spesifik lokasi;
- Perencanaan tata guna lahan dapat berfungsi sebagai bagian dari **kajian lingkungan hidup strategis untuk menyaring pembangunan dan rencana tata ruang** yang tidak berkelanjutan;



Kebijakan dan Peraturan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Nasional

Sistem perencanaan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)

Perencanaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH).

Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Perencanaan Tata Ruang

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang (UU PR)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengendalian Emisi GRK

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sulawesi Selatan

- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2022-2050
- Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045



2. Prinsip dan Tahapan Pengembangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Prinsip Perencanaan

Proses-Inklusif

Melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dalam membahas, menyampaikan aspirasi, dan merundingkan strategi dan intervensi ekonomi hijau melalui pengetahuan dan konteks lokal.



Informed-Data dan Informasi

Prinsip informed memastikan bahwa dampak *ex-ante* terhadap ekonomi sosial dan lingkungan dibuat berdasarkan pengetahuan yang berasal dari data, informasi, dan pemahaman proses dan fungsi yang kontekstual.

Integrative-Visi dan Muatan

Menggarisbawahi pentingnya memiliki proses yang bersinergi dan tujuan yang selaras di seluruh konservasi, pembangunan, dan perencanaan tata ruang, serta menghindari *silo*.

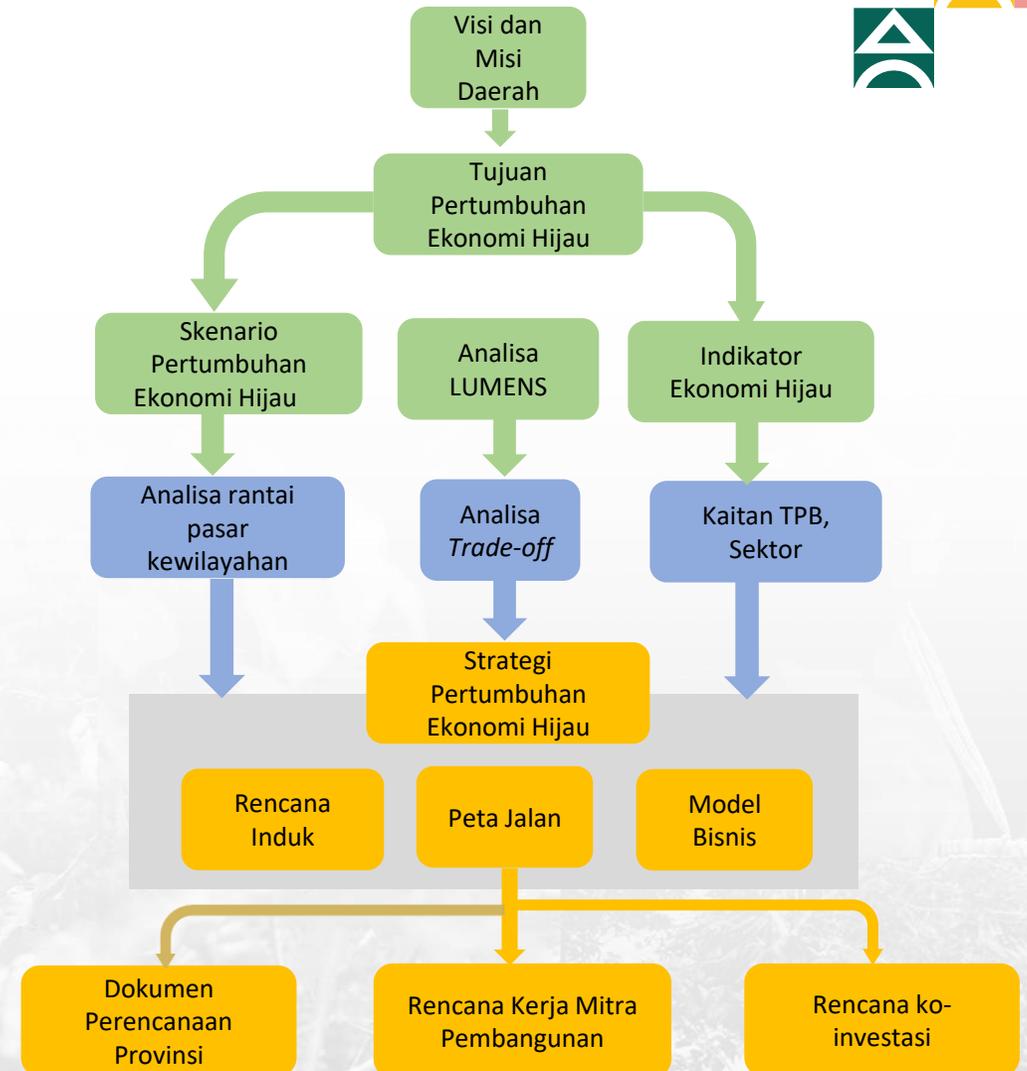


Kerangka Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau

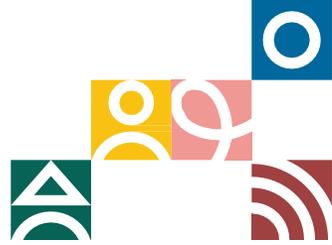
Proses perencanaan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GPP) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui studi iteratif terhadap beberapa skenario pengembangan yang mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- 1) kebutuhan lahan untuk berbagai fungsi dari berbagai pemangku kepentingan;
- 2) pengaturan sosial;
- 3) kebijakan alokasi lahan;
- 4) kesesuaian lahan;
- 5) manfaat ekonomi serta aspek lingkungan sehingga dapat diperoleh rencana tata ruang; dan
- 6) peningkatan nilai produk serta perbaikan pasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pemerataan dengan dampak lingkungan minimal.

Peta jalan (*road map*) disusun untuk mengarah ke tahap implementasi.



Proses Perencanaan

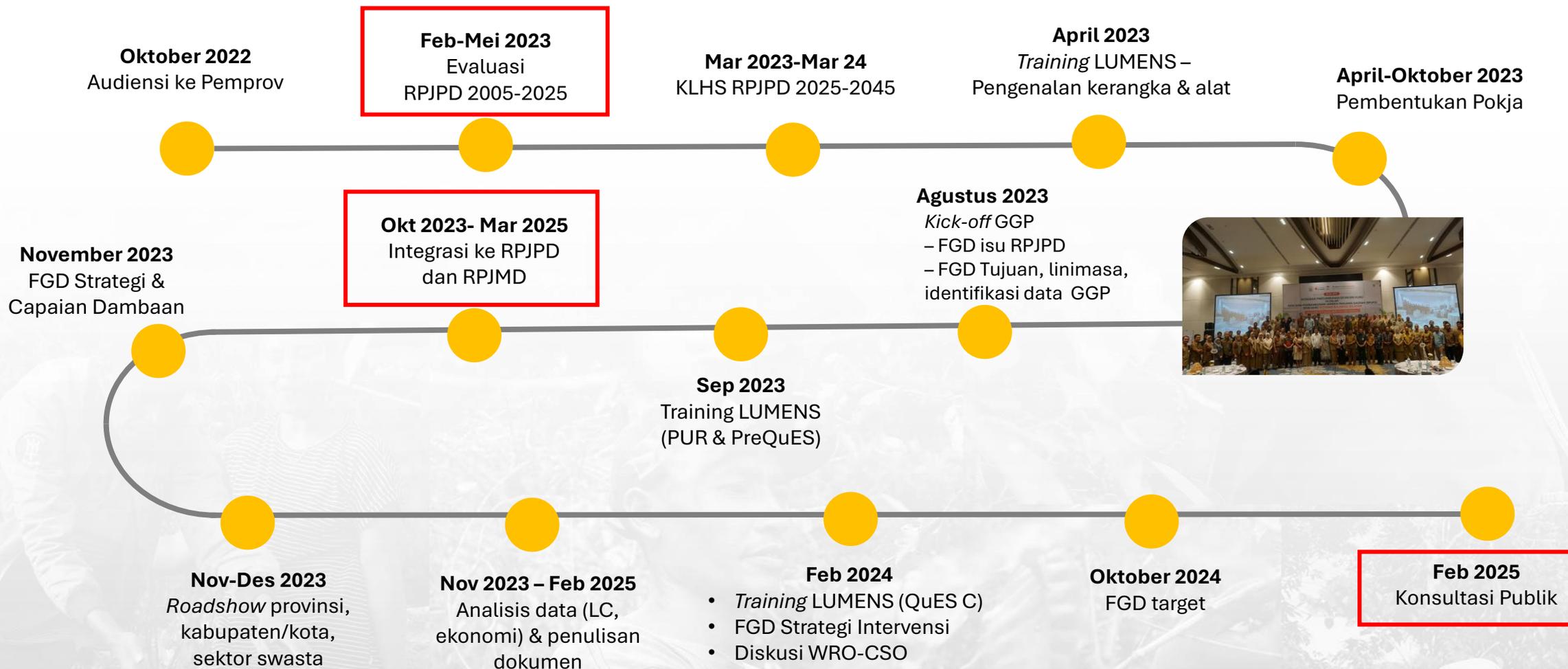


Pengembangan GGP Sulsel akan mencakup serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan akhir. Kegiatan akan diawali dengan meng**identifikasi** dan **memetakan** pemangku kepentingan utama untuk selanjutnya mencari **pemahaman umum** dan **tujuan bersama** dalam mencapai pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan di sektor berbasis lahan dan sektor terkait lahan.

Aspirasi dan kontribusi pemangku kepentingan utama akan diupayakan dalam pengembangan skenario *'business as usual'* (BAU) dan analisis teknis dampak yang diproyeksikan dari skenario BAU yang diproyeksikan pada tahun 2045. Skenario dan penilaian ini akan digunakan sebagai saran dalam diskusi pemangku kepentingan mengenai identifikasi Indikator Kinerja Utama (KPI) dan penetapan target pertumbuhan hijau untuk setiap KPI.



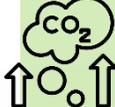
Tahapan Proses Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau





3. Rumusan Tujuan dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Usulan Indikator Makro Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

 <p>Laju deforestasi 1</p>	 <p>Laju perluasan tutupan pohon 2</p>	 <p>Laju perluasan agroforestri 3</p>	 <p>Emisi GRK (berbasis lahan) 4</p>
<p>Luas kehilangan tutupan lahan hutan, menggambarkan sejauh mana upaya pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan (ha/tahun).</p>	<p>Luas penambahan pohon melalui kegiatan reboisasi/revegetasi/restorasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan (ha/tahun).</p>	<p>Agroforestri memberikan banyak manfaat ekonomi dan lingkungan dalam mengatasi berbagai kondisi lingkungan dan sesuai dengan pilihan masyarakat (ha/tahun).</p>	<p>Emisi pada lahan mineral yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dimana emisi menjadi salah satu faktor perubahan iklim (Mton CO₂ eq).</p>
 <p>Emisi (sumber lain) 5</p>	 <p>Sekuestrasi GRK 6</p>	 <p>Fragmentasi habitat/DIFA 7</p>	 <p>Erosi (ketahanan air) 8</p>
<p>Emisi dari selain tanah mineral, dimana emisi menjadi salah satu faktor perubahan iklim (Mton CO₂ eq).</p>	<p>Peningkatan cadangan karbon termasuk dalam konteks penurunan emisi GRK yang berkorelasi dengan mitigasi iklim dan pembangunan rendah karbon (Mton CO₂ eq).</p>	<p>Keanekaragaman hayati, dimana fragmentasi menunjukkan berkurangnya soliditas/kekompakan vegetasi pada suatu lanskap yang dapat menjadi habitat penting (indeks kehati).</p>	<p>Penumpukan endapan atau material padatan di suatu tempat sebagai salah satu dampak negatif dari pengelolaan lahan (ton/ha).</p>

Usulan Indikator Makro Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau



In partnership with
Canada



Aliran permukaan (ketahanan air) 9

Menggambarkan keseimbangan aliran air, dimana semakin besar aliran permukaan menggambarkan semakin menurunnya kualitas bentang alam (indeks hidrologi).



Penurunan risiko bencana kebakaran 10

Risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan stabilitas bentang alam terhadap kebakaran yang disebabkan oleh berbagai factor (%).



Ketahanan Pangan (Ketersediaan, akses & distribusi) 11

Ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.



Pendapatan 12

Besarnya pendapatan yang diterima masyarakat dari adanya komponen PDB (Triliun rupiah).



Keterkaitan sektor lahan dengan sektor lain 13

Keterkaitan antara sektor lahan dengan sektor lain menunjukkan hubungan timbal balik dan arus sumber daya (indeks ekonomi regional).



Serapan tenaga kerja 14

Jumlah lapangan kerja di masing-masing sektor, semakin besar jumlah lapangan kerja menggambarkan kondisi perekonomian yang baik (ribu orang).



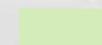
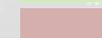
Rasio Pendapatan Terhadap Keuntungan Usaha 15

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari suatu usaha (Triliun rupiah).



Rasio keuntungan usaha tani 16

Menjelaskan manfaat ekonomi yang diterima pekerja dibandingkan dengan manfaat keseluruhan dari kegiatan ekonomi (%).

 Indikator lingkungan
 Indikator ekonomi

Usulan Indikator Makro Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau



In partnership with
Canada



Laju pertumbuhan PDRB

17

Persentase pertumbuhan PDRB yang diharapkan setiap tahun (Triliun rupiah).



Intensitas Emisi

18

Rasio jumlah emisi dengan ekonomi, berguna untuk mengevaluasi efisiensi dan tingkat keberlanjutan dari suatu proses atau kegiatan yang mengeluarkan emisi GRK (Ton CO₂eq/Miliar rupiah)



Rasio penguasaan lahan oleh masyarakat

19

Menggambarkan luas lahan yang dapat diakses oleh masyarakat (%).

■ Indikator ekonomi
■ Indikator Sosial



4. Rumusan Tujuan dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

1. Ekosistem Sehat dan Produktif

Ekonomi berbasis teknologi dan inovasi dengan solusi berbasis alam (*Nature-Based Solutions*), sehingga dapat meningkatkan jasa lingkungan, produktivitas komoditas, dan resiliensi terhadap perubahan iklim.

2. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Inklusif, dan Adil

Pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan panjang dengan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pemerataan manfaat ekonomi, perhatian pada kelompok rentan, dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3. Penghidupan yang Adaptif terhadap Dinamika Global

Perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cepat akibat globalisasi dan faktor eksternal. Meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap disrupsi dengan pendekatan ekonomi yang fleksibel dan tangguh.

4. Pengendalian Emisi GRK dari Sektor Berbasis Lahan dan Ekosistem Pesisir

Cuaca ekstrem, kehilangan lahan pesisir, dan penurunan sumber penghidupan. Restorasi lahan kritis, rehabilitasi mangrove, agroforestri, dan pencegahan alih fungsi lahan. Pengendalian emisi dikombinasikan dengan adaptasi untuk meminimalkan risiko di masa depan.



Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

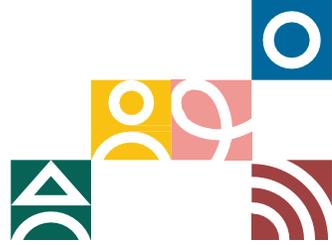
Strategi 1	:	Pengelolaan tata ruang dan guna lahan terintegrasi
Strategi 2	:	Optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan inovatif
Strategi 3	:	Pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah
Strategi 4	:	Perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi
Strategi 5	:	Konektivitas wilayah yang adaptif terhadap bencana
Strategi 6	:	Pengelolaan dan restorasi DAS
Strategi 7	:	Pemanfaatan instrumen ekonomi untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan

Strategi – Capaian Dambaan



Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 1 Pengelolaan tata ruang dan tata guna lahan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan ruang wilayah yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat2. Keseimbangan pemanfaatan ruang untuk pengembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan3. Kesetaraan penguasaan lahan4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada prinsip keberlanjutan5. Pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya6. Pemanfaatan lahan mendukung ketahanan pangan masyarakat
Strategi 2 Optimalisasi modal dan akses pembangunan yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerataan akses modal pembangunan untuk semua pihak termasuk perempuan dan kelompok terpinggirkan2. SDM yang berkualitas, profesional, dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau3. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani/pekebun/peternak/nelayan4. Kemudahan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan5. Kemudahan akses terhadap berbagai bentuk sumber permodalan, termasuk pendanaan dan pembiayaan inovatif, untuk kegiatan ekonomi masyarakat6. Perluasan jaringan kerja dan investasi bisnis yang berbasis ekonomi hijau

Strategi – Capaian Dambaan

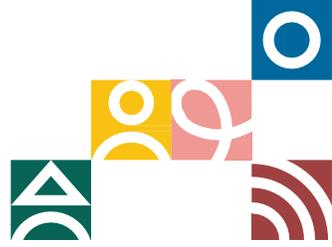


Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 3 Pengembangan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Produk unggulan daerah dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional2. Peningkatan praktik pertanian yang baik sehingga produksi per unit lahan meningkat (agroforestri), kesuburan tanah terpelihara, dan sistem usaha tani berkelanjutan3. Penerapan pertanian cerdas iklim sebagai bentuk adaptasi dampak perubahan iklim4. Produktivitas pangan terjaga untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun nasional5. Resiliensi penghidupan masyarakat melalui penerapan agroforestri dan <i>agrosilvofishery</i>
Strategi 4 Perbaiki rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerataan ekonomi dan penghapusan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan2. Peningkatan nilai tambah produk dan skala ekonomi3. Peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM dan koperasi untuk sebagai motor pertumbuhan ekonomi masyarakat4. Penerapan <i>circular economy</i> melalui inisiasi hubungan input-output yang tidak terputus dalam rantai nilai untuk mengurangi waste akibat proses produks
Strategi 5 Konektivitas wilayah yang adaptif terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Konektivitas dan aksesibilitas yang memadai antara kabupaten-kota hingga ke pulau-pulau kecil untuk menunjang penghidupan masyarakat2. Peningkatan pembangunan industri hilir komoditas unggulan3. Tata kelola kebencanaan yang tanggap, responsif, inklusif, dan terintegrasi didukung oleh infrastruktur yang memadai4. Transportasi rendah emisi karbon

Strategi – Capaian Dambaan



Strategi	Capaian Dambaan
Strategi 6 Pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan penerapan agroforestri untuk restorasi daerah sekitar DAS dengan pelibatan masyarakat secara intensif2. Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan3. Mengamankan ketersediaan air untuk kebutuhan domestik dan industri sepanjang tahun4. Tidak terjadi pencemaran dan penurunan kualitas DAS
Strategi 7 Pemanfaatan instrumen ekonomi untuk pengelolaan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan penerapan skema pembayaran jasa lingkungan yang berbasis kinerja dan responsif gender2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan lingkungan3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup4. Terbangunnya pasar <i>voluntary</i> berbagai jasa lingkungan antara lain tata kelola air, ekowisata, cadangan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati



5. Penutup



Catatan Penutup

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan rumusan **rencana pertumbuhan ekonomi hijau** sebagai bagian dari komitmen daerah untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- Berbagai strategi dan intervensi telah disusun untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masa depan lebih **berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat**.
- Pentingnya dukungan dari aspek **kelembagaan** untuk memastikan implementasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana ini.
- Perlunya pembentukan forum *multistakeholder* yang akan menjadi wadah untuk kolaborasi antar berbagai pihak, serta mengawal implementasi dan evaluasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau.
- Kerjasama yang erat dengan semua pihak sangat dibutuhkan dalam proses **mainstreaming** ekonomi hijau, sehingga pertumbuhan ekonomi selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
- Menindaklanjuti berbagai peluang **investasi hijau di daerah** serta menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam memastikan dampak positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.